

**UPAYA PERBAIKAN HUBUNGAN INDONESIA-
TIONGKOK PASCA KONFLIK NATUNA UTARA TAHUN
2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun oleh:

ALDI PANGESTU WIGANDA

07041381823176

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“UPAYA PERBAIKAN HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK
PASCA KONFLIK NATUNA UTARA TAHUN 2019”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Aldi Pangestu Wiganda

07041381823176

Dosen Pembimbing

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Tanda Tangan

Tanggal



29 Juli 2022

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**

Sutyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**UPAYA PERBAIKAN HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK PASCA
KONFLIK NATUNA UTARA TAHUN 2019**

Skripsi

Oleh :

Aldi Pangestu Wiganda

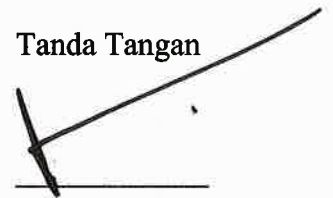
07041381823176

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 7 September 2022**

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Tanda Tangan



Dosen Penguji :

1. Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031001
2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP. 1610082505890002

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Pangestu Wiganda
NIM : 07041381823176
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 6 Maret 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Upaya Perbaikan Hubungan Indonesia-Tiongkok Pasca Konflik Natuna Utara Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 29 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Aldi Pangestu Wiganda
NIM. 07041381823176

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup penulis, Ayahanda dan Ibunda. Membuat segalanya menjadi mungkin, segala dukungan dan pengorbanan baik secara moral maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses studi ini dengan baik. Terima kasih untuk segala nasihat, semangat dan doa yang tidak pernah berhenti diberikan.”

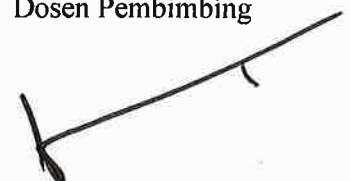
ABSTRAK

Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di dunia telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi tonggak Indonesia dalam menjalin kerjasama dalam beragam aspek pada berbagai forum baik regional, bilateral, maupun multilateral. Namun fakta menunjukkan bahwa tidak semua kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia berakhir baik dan saling menguntungkan seperti hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok. Konflik di Perairan Natuna Utara menjadi alasan ketegangan yang terjadi antara kedua negara tersebut. Akibatnya diperlukan upaya dalam memperbaiki hubungan bilateral yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Tiongkok. Melihat ketegangan tersebut, Indonesia dan Tiongkok memperkuat hubungan bilateral mereka dengan beragam cara. Penelitian ini menjelaskan tentang Upaya Perbaikan Hubungan Indonesia dan Tiongkok Pasca Konflik Natuna Utara Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep Teori Resolusi Konflik. Ditinjau dari empat aspek. Pertama, dilihat dari diagnosis konflik yang ditinjau dari penentuan jenis konflik dan identifikasi masalah. Kedua, dilihat dari identifikasi solusi alternatif yang ditinjau dari *brainstorming* dan strategi reflektif. Ketiga, dilihat dari evaluasi dan pemilihan solusi yang ditinjau dari evaluasi dan identifikasi serta pemilihan solusi yang tepat. Keempat, dilihat dari aspek komitmen pada pilihan dan cara menjalankannya yang ditinjau dari penerapan solusi dan penguatan hubungan.

Kata kunci: Hubungan Bilateral, Indonesia, Tiongkok, Natuna Utara, Teori Resolusi Konflik

 Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Dosen Pembimbing


Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

ABSTRACT

Indonesia's relations with countries in the world have started since Indonesia proclaimed independence on August 17, 1945. This historical event became a milestone for Indonesia in establishing cooperation in various aspects at various regional, bilateral and multilateral forums. However, the facts show that not all cooperation carried out by Indonesia ends well and is mutually beneficial, such as bilateral relations between Indonesia and Tiongkok. The conflict in the North Natuna Sea is the cause of conflict between the two countries. The result of the efforts needed to improve the longstanding bilateral relations between Indonesia and Tiongkok. Seeing this, Indonesia and Tiongkok have strengthened their bilateral relations in various ways. This study describes the Efforts to Improve Relations between Indonesia and Tiongkok after the North Natuna Conflict in 2019. This research uses the conceptual framework of Conflict Resolution Theory. Judging from four aspects. First, it is seen from the conflict diagnosis chosen from facing problems and problems. Second, it is seen from alternative solutions regarding brainstorming and reflective strategies. Third, seen from the evaluation and selection of solutions in terms of evaluation and evaluation as well as the selection of the right solution. Fourth, seen from the aspect of commitment to choices and how to run them in terms of implementing solutions and supporting relationships.

Keywords: *Bilateral Relations, Indonesia, Tiongkok, North Natuna, Conflict Resolution Theory*

Head of Department
of International Relations

Solyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Advisor

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, arahan, bimbingan, serta kritik dan saran yang diberikan selama penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Allah SWT., yang telah memberikan segala nikmat, berkat, rahmat, dan karunianya dalam hidup penulis dan selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA Selaku Dosen Penguji I yang baik dan dihormati, berbagai kritik dan masukannya pada skripsi penulis.
7. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int Selaku Dosen Penguji II dan Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah baik memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan maupun kritik dan saran terhadap skripsi penulis.

8. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA., dosen penulis yang sangat baik memberikan arahan, bimbingan, dukungan dan motivasi selama penulisan dan penyelesaian skripsi.
9. Kepada Mba Anty dan Mba Sertin, Admin Ilmu Hubungan Internasional Palembang yang baik dalam membantu penyelesaian administrasi kampus selama masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh jajaran Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orang tua tercinta, Ayah Jajat Sudrajat, SH dan Ibu Nasmiana yang senantiasa membanggakan saya, selalu mencintai, mendoakan, menanyakan kabar, memastikan keadaan, dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi. Tanpa mereka berdua penulis tidak akan kuat melangkah sejauh ini terlepas dari tanggung jawab yang besar dan beban moral sebagai anak.
12. Saudara-saudari penulis, Nanda Widhitama, SE., Ariani Dwi Putri, SE., Reyna Dini Wigustha, S.ST., Kukuh Wirasetiyo, S.T. dan Pratiwi Widya Triana, S.KM yang selalu sayang, mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi.
13. Salwa Adelia Costangen yang selalu ada dalam mendukung, mendoakan dan memberikan masukan selama penulisan dan penyelesaian skripsi.
14. Rekan-rekan sejawat M. Chairul Ferdiant dan M. Kedri Arya Arthallah yang selalu ada disaat penulis memerlukan bantuan, canda tawa, dan diskusi selama penyusunan skripsi.
15. Teman-teman angkatan 2018 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Palembang.

16. Sahabat-sahabat terbaik dalam hidup penulis Harris Fadillah, M. Aditya Wardhana, Ahmad Andree Gusti N.P yang selalu ada dan mendukung dalam keadaan susah maupun senang selama berproses di hidup ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT., membalas jasa dan amal baik semua pihan dan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang, 22 September 2022

Aldi Pangetsu Wiganda

07041381823176

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kerangka Teori.....	16
2.2.1 Teori Resolusi Konflik.....	16
2.3 Alur Pemikiran	21
2.4 Argumentasi Utama.....	21
BAB III.....	22
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.2 Definisi Konsep.....	22
3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Unit Analisis.....	25
3.5 Jenis dan Sumber Data	25
3.5.1 Jenis Data	25
3.5.2 Sumber Data.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Keabsahan Data	26

3.8	Teknik Analisa Data.....	27
BAB IV		28
4.1	Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok	28
4.2	Sejarah Persoalan Natuna Utara	30
4.3	Konflik Natuna Utara Tahun 2019.....	33
BAB V.....		38
5.1	Diagnosis Konflik	38
5.1.1	Menentukan Jenis Konflik	39
5.1.2	Mengidentifikasi Masalah	42
5.2	Identifikasi Solusi Alternatif	48
5.2.1	<i>Brainstorming</i>	48
5.3	Evaluasi dan Memilih Solusi.....	66
5.3.1	Evaluasi Hasil Identifikasi	66
5.4	Komitmen Pada Pilihan dan Menjalankannya	69
5.4.1	Penerapan Solusi	69
5.4.2	Penguatan Hubungan.....	77
BAB VI.....		81
6.1	Kesimpulan	81
6.2	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	6
Gambar 4. 1	34
Gambar 4. 2	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok pada awalnya dilaksanakan pada tahun 1950 yang terjadi secara resmi ketika beberapa bulan Tiongkok mendeklarasikan sebagai negara merdeka. Kedua negara tersebut melakukan kerja sama hingga rentang waktu 1967 secara harmonis, Indonesia dipimpin oleh presiden Ir. Soekarno dan Tiongkok dipimpin oleh presiden Mao Zedong, sedangkan Tiongkok pada saat itu merupakan negara baru yang menganut ideologi komunisme. Hubungan yang dilakukan antara kedua negara tersebut memiliki artian bahwa komitmen kebijakan politik dan luar negeri Indonesia yaitu bebas dan aktif. Pada masa itu dunia dalam keadaan perang dingin, akan tetapi kerja sama kedua negara tetap dilakukan dan dijalankan sedangkan fokus kerja sama lebih mengarah pada bidang kebudayaan dan pendidikan (Firdaus, 2020). Pada era kepemimpinan presiden Soeharto terjadinya peristiwa yang memilukan bagi bangsa Indonesia yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) pada tahun 1965 yang makin memperpuruk hubungan kerja sama internasional antar kedua negara tersebut. Indonesia beranggapan bahwa Tiongkok melakukan intervensi pada Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kudetanya terhadap sistem pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini serta melakukan aksi untuk perubahan ideologi komunisme di Indonesia. Selang dua tahun tepatnya pada tahun 1967, Indonesia memutuskan hubungan kenegaraan dengan Tiongkok (Rusydati, 2014).

Setelah dibekukan selama 22 tahun normalisasi hubungan dilakukan pada tahun 1989. Presiden Soeharto membuka kembali hubungan diplomatik yang ditandai dengan ditandatanganinya *The Resumption of the Diplomatic Relation between the Two Countries* di Beijing pada tahun 1990 (Sinaga, 2013). Kembalinya hubungan diplomatik yang baik antar Indonesia dan Tiongkok membuat kedua negara meningkatkan kerja sama, perjanjian dan kesepakatan di berbagai bidang dan yang menjadi fokus utama dalam kerja sama tersebut ialah bidang ekonomi demi memenuhi kepentingan satu sama lain (Rusydati, 2014). Hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok semakin berkembang pesat ketika adanya Deklarasi Kemitraan Strategis. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh presiden Tiongkok Hu Jintao bersama presiden Indonesia masa itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jakarta 25 april 2005 pada saat kunjungan presiden Tiongkok ke Indonesia pada peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia. Kemitraan strategis itu sendiri menekankan pada kolaborasi di sejumlah bidang, termasuk sosial budaya, ekonomi, dan politik-keamanan (Sinaga, 2013).

Hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok tentu menguntungkan kedua negara, mengingat Indonesia menjadikan Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan ekspor selain Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia merupakan negara besar di antara bangsa-bangsa Asia jika dilihat dari segi wilayah dan jumlah penduduk (Fascacellya E. Kalebos, 2021). Menurut Teuku Rezasyah sebagai pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Bandung menilai penyebab pengaruh Tiongkok dapat begitu besar di kawasan Asia termasuk Indonesia ialah faktor ekonomi. Teuku Rezasyah mengatakan Tiongkok lebih agresif berinvestasi, mencari importir-importir produk domestik yang dibuktikan

dengan perjanjian-perjanjian persahabatan serta mengoptimalkan kerja sama sub negara (VOA Indonesia, 2020). Dinamika hubungan kerja sama antar kedua negara tersebut memiliki kepentingan tersendiri atas kerja sama yang dibangun. Tiongkok sendiri mempunyai keinginan kuat untuk dapat menguasai perekonomian dunia sehingga membuat negara tersebut melaksanakan beberapa hubungan kerja sama secara intensif dengan beberapa negara di dunia serta di Indonesia. Alasan negara tersebut melakukan kerja sama dengan Indonesia karena Indonesia negara dengan letak geografis yang strategis kemudian Indonesia juga termasuk kedalam negara yang terbesar di wilayah Asia Tenggara (Hasibuan, 2019).

Sering ada variasi dalam perspektif, kepentingan, dan bahkan sikap negara-negara yang terlibat dalam interaksi internasional. Isu teritorial merupakan salah satu isu yang disebabkan oleh disparitas pandangan nasional. Disparitas perspektif sejarah yang mengakibatkan perbedaan persepsi masing-masing negara terhadap wilayah tertentu seringkali melahirkan perbedaan pendapat tentang wilayah tersebut. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, Indonesia seringkali menghadapi permasalahan wilayah, mulai dari sengketa perbatasan hingga Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Perairan di sekitar Natuna Utara merupakan salah satu tempat di Indonesia yang menjadi masalah *illegal, unreported, and unregulated (IUUF) fishing* oleh nelayan asing. Salah satu pulau paling terpencil di Indonesia, Perairan Natuna Utara terletak di sebelah wilayah perairan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Karena kedekatannya dengan laut teritorial banyak negara, maka rentan terhadap praktik penangkapan ikan IUUF (*illegal, unreported, unregulated, fishing*) (Pratiwi, 2019).

Berdirinya suatu negara terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Salah satu unsur yang ada dan merupakan unsur paling utama adalah terdapatnya sebuah wilayah kekuasaan teritorial dari negara tersebut. Di samping itu, juga terdapat unsur lainnya yaitu dilihat dari unsur warga negara dan sistem pemerintahan yang dianut di negara tersebut. Di satu sisi, berdirinya kedaulatan suatu negara juga tidak terlepas dari adanya peraturan yang tertera secara hukum resmi. Karena, apabila tidak terdapatnya peraturan resmi maka semakin memperpuruknya status permasalahan serta ketidakpastian perihal adanya batas-batas wilayah dengan negara lainnya yang memiliki lokasi wilayah yang sangat berdekatan. Seringkali, problematika ketidakjelasan sengketa wilayah timbul karena adanya perbedaan prinsip yang dianut oleh suatu negara dalam menentukan batas-batas wilayah kontinen antar negara-negara yang berdekatan yang pada akhirnya memunculkan ketidakuratan wilayah yang dicurigai dapat memunculkan adanya persengketaan wilayah (Tampi, 2017).

Salah satu perairan yang terdapat di wilayah negara Indonesia tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau yaitu di Kepulauan Natuna juga terkena klaim secara sepihak oleh Tiongkok yaitu adanya kebijakan *Nine Dash Line*. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemerintah Tiongkok yang merupakan Perairan di Kepulauan Natuna termasuk terkena klaim atas kebijakan *Nine Dash Line* yang dikeluarkan oleh Tiongkok pada kawasan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia memegang kedaulatan atas perairan dan hak berdaulat di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan, dengan tidak terlibat aktif dalam sengketa di kawasan dan menjadi negara non-claimant. Dalam skenario ini, Indonesia memiliki kepentingan dalam keamanan kawasan, yang meliputi keutuhan

wilayah, kepentingan ekonomi di sebagian Laut Tiongkok Selatan, dan stabilitas kawasan. Perairan ini memiliki total luas wilayah sebesar 141.901 kilometer persegi. Dengan perairan 138.666,0 kilometer persegi dan daratan 3.235,20 kilometer persegi, termasuk 2,4 persen pulau besar dan kecil, wilayah perairan sejauh ini merupakan mayoritas. Perairan Natuna yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan perairan internasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan terhubung dengan perairan bebas, menjadikan kawasan ini rentan terhadap kegiatan IUUF, dengan peringkat produksi perikanan Natuna setinggi angka 8 atau 9% dari potensi sumber daya alam (Harum Umar, 2020).

Pada tahun 2019 Indonesia dan Tiongkok kembali mengalami konflik di perairan Natuna Utara. Akibat masuknya kembali kapal-kapal penangkap ikan dari Tiongkok ke perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau pada Desember 2019 lalu, yang terbukti melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Selain kapal asing milik Tiongkok, Kapal *Cost Guard* Tiongkok juga dianggap melanggar kedaulatan perairan Natuna Utara (Muslimah, Santiyah, & Adi, 2020). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri sempat melakukan protes dengan pemanggilan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, namun protes tersebut tidak dihiraukan. Masuknya kapal asing ini juga menyebabkan keresahan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan Natuna Utara dikarenakan adanya intimidasi dari kapal-kapal asing tersebut. Keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna sendiri tidak dianggap oleh Tiongkok, sedangkan yang dianggap oleh Tiongkok ialah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Tiongkok (Fauzan, 2020). Namun, klaim historis Tiongkok dengan *nine dash line* atas perairan Natuna Utara dianggap tidak berdasar karena

tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982. Sedangkan, pendirian Indonesia ini didasari oleh UNCLOS 1982 dan Mahkamah Internasional tahun 2016 yang berlaku secara Internasional (Mahabharata, 2021).



Gambar 1. 1

Peta Perairan Natuna Utara

(Sumber : BBC News Indonesia)

Penyebab sengketa antara Indonesia dan Tiongkok terjadi ialah potensi yang besar pada kekayaan sumber daya alam, Dimulainya babak baru konflik Natuna ini dipicu oleh masuknya kembali kapal-kapal penangkap ikan dari Tiongkok ke perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau pada Desember 2019. Kapal-kapal tersebut diketahui telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Dalam perkembangannya kebijakan ini adalah sebagai kebijakan

11-Dash Line dan klaim *11-Dash Line* menjadi *Nine Dash Line*, dengan dasar ini Tiongkok dapat mengeluarkan kebijakan klaim pada wilayah Natuna Utara. Laut regional Indonesia hingga 200 mil lepas pantai diatur oleh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna berdasarkan hukum internasional. Perairan Natuna memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia dan sumber daya mineral berupa gas alam. Natuna juga merupakan daerah penghasil minyak dengan pemboran minyak lepas pantai yang dilakukan oleh migas di semua sumur eksplorasi sebesar 21,8 Triliun Rupiah. Ini adalah bukti nyata dari potensi besar perairan Natuna Utara untuk menghasilkan kekayaan alam (Rendi Prayuda, 2020).

Akibat ketegangan yang ditimbulkan oleh konflik Laut Tiongkok Selatan, hubungan Indonesia dan Tiongkok yang menjunjung tinggi prinsip saling menghormati dan menghargai sebagai bangsa yang sederajat serta memiliki tugas untuk menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan, menjadi tegang. Menurut Grossman (2020) dalam Rahmawati Indonesia dan Tiongkok saling menekan, yang terlihat dari berlanjutnya ketegangan Beijing di perairan Natuna Utara. Sementara itu, fokus Indonesia pada strategi maritim, khususnya Poros Maritim Global pada 2014, membuat Tiongkok merasa khawatir dan terancam posisinya dalam menerapkan sembilan garis putus-putus (Rahmawati, 2021). Selain itu, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan terhadap pangkalan TNI Angkatan Laut di kawasan Natuna Utara, memperluas landasan penerbangan pangkalan TNI Angkatan Udara serta juga memperkuat pertahanan militer TNI Angkatan Darat di daratan dalam merespon segala bentuk ancaman yang dilakukan oleh Tiongkok (Winarto, 2018).

Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, berbicara di KTT G-20, KTT ASEAN, dan acara lainnya sambil berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Siliwanti, 2015). Kemampuan menjaga keamanan kawasan sangat diperlukan demi cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia. Untuk memantapkan diri sebagai poros maritim dunia, Indonesia perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Kepentingan berbagai negara terwakili dalam kebijakan poros maritim Indonesia. Untuk dapat menampung kepentingan negara-negara dan menciptakan wilayah yang damai, kebijakan tersebut perlu didukung dengan diplomasi maritim yang kontemporer dan inovatif sehingga dapat hadir menjadi negara maritim yang dihormati atau diakui secara internasional (Pujayanti, 2018).

Goyahnya hubungan kedua negara akibat perselisihan wilayah laut teritorial Natuna Utara tidak berlangsung lama. Hal ini ditunjukkan dengan semakin eratnya hubungan kedua negara di berbagai bidang. Kebutuhan pengeluaran yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur telah mendorong Indonesia untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi yang erat dengan Tiongkok. Terkait ekonomi dan penguasaan perairan Natuna Utara, diplomasi Indonesia dengan Tiongkok memiliki karakter dan struktur kepentingan yang berbeda. Dalam upaya untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Tiongkok, gagasan kolaborasi praktis dipraktikkan. Di bidang kedaulatan antara kedua negara tersebut, bertumpu pada prinsip kepentingan strategis (Muhammad Tri Andika, 2017). Adanya pandemi *Covid-19* membuat Indonesia bekerja sama dalam pengembangan vaksin dengan Tiongkok. Kerja sama ini tidak hanya harus bisa memenuhi kebutuhan vaksin bagi kedua negara, akan tetapi transparansi serta

keterbukaan akses vaksin juga harus terpenuhi (Samiah Zulvianto, 2021). Indonesia dan Tiongkok memiliki kesepakatan dalam mengembangkan ekonomi dan meningkatkan masyarakat negara dengan cara pertumbuhan yang konstan, stabil serta cepat dan kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral ditingkatkan. Kerja sama Indonesia dan Tiongkok diperlukan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kedua negara (Supriatna, 2016). Dari kondisi tersebut penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai Upaya Perbaikan Hubungan Indonesia-Tiongkok Pasca konflik Laut Natuna Utara Tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang dikemukakan oleh penulis dalam konteks penelitian ini, rumusan masalah adalah “Bagaimana Upaya Perbaikan Hubungan Indonesia-Tiongkok Pasca konflik Laut Natuna Utara Tahun 2019 ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisa Upaya Perbaikan Hubungan Indonesia-Tiongkok Pasca konflik Laut Natuna Utara Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian diharapkan berpotensi untuk memberikan wawasan dan inspirasi bagi kajian-kajian selanjutnya tentang upaya peningkatan hubungan Indonesia-Tiongkok pasca-Konflik Laut Natuna Utara tahun 2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini antara lain diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga atau instansi terkait sebagai sarana untuk menawarkan informasi dan menjadi faktor penentu arah atau kebijakan ke depan terkait kerja sama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Mirzaqon, B. P. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Universitas Negeri Surabaya*, 3.
- Abdullah, F. N. (2019). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Perubahan Nama Laut Tiongkok Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Tahun 2017. *Skripsi Ilmu Hubungan Internasional Univesrsitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 73-74.
- Aboukhawat, M. G. (2019). The legal status of archipelagos in the international. *Economics, Law and Policy*, 2 (2), 189-204.
- Afandi, T. (2018, Januari 21). *Bappenas: Perusahaan Indonesia Harus Jadi Ivestor Utama Pembangunan Infrastruktur*. Retrieved Juli 20, 2022, from Bappenas.go.id: <https://www.bappenas.go.id/files/aad7c859-3c89-4f0b-bc52-dbcd8136e526/download>
- Akmal. (2015). Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014. *Universitas Riau Jom Fisip Volume 2 No. 2*, 2-3.
- Aldila, N. (2020, Agustus 20). *Harian Jogja*. Retrieved July 18, 2022, from Menlu Retno dan Menteri BUMN Erick Thohir Bertemu Menlu China Wang Yi, Ini Hasilnya: <https://ekbis.harianjogja.com/read/2020/08/20/502/1047631/menlu-retno-dan-menteri-bumn-erick-thohir-bertemu-menlu-china-wang-yi-ini-hasilnya>
- Alhasyim, A. I. (2019). Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Indonesia Dalam Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 1.
- Alhasyim, A. I. (2019). Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Indonesia Dalam Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 30-31.
- Andika, M. T., & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesian Perspective, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2017)*: 161-179, 166-167.
- Anugerah, B. (2021). Penguatan Strategi Penangkaln Dalam Merespons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Universitas Indonesia*, 294-295.

- Anugerah, B. (2021). Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Merespons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Universitas Indonesia*, 295.
- Anugerah, B. (2021). Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Mersepons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Universitas Indonesia*, 295-296.
- Aragu, O., & Adangor, Z. (2018). An evaluation of the rights and duties of the rights and duties of coastal states under the united nations convention on the law of the sea. *African Journal of Law and Criminology*, 8(1), 65-84.
- Arief Bakhtiar Darmawan, H. R. (2019). Penggunaan ASEAN Way dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan? *Andalas Journal of Internasional Studies Vol. 8 No. 1*.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. In *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (p. 187). Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. In *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (p. 22). Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Babbitt, E. F. (2009). The Evolution of International Conflict Resolution: From Cold War. *Negotiation Journal October 2009*, 540.
- Bangun, B. H. (2021). Upaya dan Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 No. 1*, 27.
- Christy, M. (2019). Diplomasi Preventif ICRC dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan. *Skripsi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan*, 17-18.
- Daniel Nazareth, J. A. (2021). Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Antara Indonesia Dan China Di Laut Natuna. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 9*, 865.
- Daniel Nazareth, J. A. (2021). Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Antara Indonesia Dan Tiongkok Di Laut Natuna. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 9*, 864.
- Darmawan, A. R. (2020, April 4). *The Jakarta Post*. Retrieved from China's traditional fishing rights claim in North Natuna Sea baseless: <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/04/chinas-traditional-fishing-rights-claim-in-north-natuna-sea-baseless.html>
- Fascacellya E. Kalebos, M. M. (2021). KERJASAMA INDONESIA-CHINA (Suatu Studi Tentang Kebijakan Penerbangan Langsung Manado-China). *Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Vol.9, No.1*, 3.

- Fauzan, H. A. (2020). *Babak Baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna*. Yogyakarta, Indonesia: Tirto.id.
- Febriyansyah Rahmat Maulana, R. R. (2020). Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara. *Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2*, 249-253.
- Firdaus, I. (2020). *70 Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok*. Jakarta: Media Indonesia.
- Fitra Deni, L. S. (2017). Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna. *Jurnal International & Diplomacy Vol. 3, No. 1*, 14-15.
- Fitra Deni, L. S. (2017). Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna. *Jurnal International & Diplomacy Vol. 3, No. 1*, 16.
- Fitra Deni, L. S. (2017). Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna Utara. *Jurnal International & Diplomacy Vol. 3, No. 1*, 14.
- Harahap, A. B. (2016). Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015. *Universitas Riau JOM FISIP Vol.3, No.2*, 5.
- Harum Umar, C. G. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Hegemoni China Di Kawasan Laut China Selatan Pada Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2016-2019. *Universitas Nasional Jurnal Ilmu Dan Budaya Vol.41, No.71*, 8373-8379.
- Hasibuan, A. I. (2019). Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Indonesia Dalam Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Skripsi, Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang*, 4-5.
- Hastuti, R. K. (2020). *Ini Kronologis RI Protes Keras Klaim China Soal Natuna*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Ilmi, N. (2020). Dampak Penamaan Laut Natuna Utara Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 No. 4*, 482-490.
- Ilmie, M. I. (2021). *China Membuka Ruang Baru Dalam Hubungan Bilateral Dengan Indonesia*. Jakarta: AntaraNews.
- Ilmie, M. I. (2021). *Indonesia-China gelar latihan militer di dekat Jakarta*. Jakarta: ANTARA.
- Iswara, A. J. (2021, Desember 4). *Kompas*. Retrieved July 18, 2022, from Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim sebagai Wilayahnya:

<https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all>

- Kemhan Indonesia. (2022, Juni 11). *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. Retrieved July 18, 2022, from Menhan Prabowo Bertemu Menhan China, Tegaskan Sikap Indonesia Pertahankan Asia Tenggara Sebagai Kawasan Damai: <https://www.kemhan.go.id/2022/06/11/menhan-prabowo-bertemu-menhan-china-tegaskan-sikap-indonesia-pertahankan-asia-tenggara-sebagai-kawasan-damai.html>
- Liemnord, T. A. (2021). Analisis Hukum Mengenai Klaim Negara China Atas Perairan Natuna Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Laut Internasional. *Skripsi Hukum Internasional Universitas Hasanuddin*, 45-46.
- Mahabarata, Y. (2021, September 20). *VOI*. Retrieved July 15, 2022, from The Roots Of The China-Indonesia Conflict In Natuna Waters: <https://voi.id/en/memori/86864/the-roots-of-the-china-indonesia-conflict-in-natuna-waters>
- Mahabarata, Y. (2021, September 20). *VOI*. Retrieved from The Roots Of The China-Indonesia Conflict In Natuna Waters: <https://voi.id/en/memori/86864/the-roots-of-the-china-indonesia-conflict-in-natuna-waters>
- Mahabharata, Y. (2021). *Akar Konflik China-Indonesia di Perairan Natuna*. Jakarta, Indonesia: voi.id.
- Maksum, A. (2017). Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan. *Jurnal Sospol Vol.3, No.1*, 4.
- Morton Deutsch, P. T. (2016). Handbook Resolusi Konflik, Teori dan Praktek. In P. T. Morton Deutsch, *BAB 1 Kerjasama dan Kompetisi* (p. 35). Bandung: Nusa Media.
- Morton Deutsch, P. T. (2016). Handbook Resolusi Konflik; Teori dan Praktek. In P. T. Morton Deutsch, *BAB 1 Kerjasama dan Kompetisi* (pp. 36-37). Bandung: Nusa Media.
- Morton Deutsch, P. T. (2016). Handbook Resolusi Konflik; Teori dan Praktek. In P. T. Morton Deutsch, *BAB 9 Model PSDM: Memadukan Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Dalam Resolusi Konflik* (pp. 240-241). Bandung: Nusa Media.
- Muhammad Tri Andika, A. N. (2017). Analisis politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Jurnal Indonesian Perspective, Vol. 2, No. 2, Universitas Bakrie* .

- Muslimah, F., Santiyah, W., & Adi, D. P. (2020). Analisis Konflik Kepulauan Natuna Tahun 2016-2019. *Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 2*, 91.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 16, No. 2*, 46.
- Perkasa, G. A. (2019). Hubungan Indonesia dan Tiongkok Pasca Diluncurkan Kebijakan Luar Negeri Belt and Road Initiative (BRI) Tahun 2013-2018. 3-10.
- Permana, R. H. (2020). *Putusan Pengadilan Arbitrase PBB: China Tak Berhak Atas Laut Natuna*. Jakarta: detikNews.
- Pratiwi, Y. (2019). Ilegal Fishing Di Laut Natuna Utara Oleh Nelayan Tiongkok Pada Tahun 2016-2017. *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, 2.
- Pujayanti, A. (2018). Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim. In A. Pujayanti, *Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim* (p. 12). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putra, A. A. (2013). Hubungan Bilateral Indonesia-Russia Paska Tragedi Sukhoi 2012. *Thesis Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Universitas*, 6.
- R.Wildan Pratama I.K, N. S. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Factum Vol. 7 No. 2*.
- Rahmat, M. Z., & Purnama, Y. (2020, November 27). *The Conversation*. Retrieved from Growing dependence on China is dangerous for Indonesia – what can be done?: <https://theconversation.com/growing-dependence-on-china-is-dangerous-for-indonesia-what-can-be-done-150372>
- Rahmawati, A. (2021). Analisis Diplomasi Publik Tiongkok di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *Skripsi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia*, 21-30.
- Rakhmat, M. Z. (2020). *Indonesia makin bergantung pada China dan itu berbahaya: apa yang bisa dilakukan*. Jakarta: The Conversation.
- Rakhmat, M. Z. (2021, Agustus 10). *The Diplomat Despite COVID-19, Indonesia-China Relations Continue to Develop*. Retrieved Juli 20, 2022, from thediplomat.com: <https://thediplomat.com/2021/08/despite-covid-19-indonesia-china-relations-continue-to-develop/>
- Rendi Prayuda, F. A. (2020). Analisis Implementasi Konsep CoC (Code of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara. *Jurnal PIR Vol. 4 No. 2*, 145.

- Rendi Prayuda, F. A. (2020). Analisis Implementasi Konsep CoC (Code of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara. *Jurnal PIR Vol. 4 No. 2*, 144.
- Rendi Prayuda, F. A. (2020). Analisis Implementasi Konsep COC (Code Of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara. *Jurnal PIR Vol. 4, No. 2*, 138.
- Rendi Prayuda, F. A. (2020). Analisis Implementasi Konsep COC (Code Of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara. *Jurnal PIR, Vol. 4, No. 2*, 141.
- Rendi Prayuda, F. A. (2020). Analisis Implementasi Konsep COC (Code Of Conduct) Dalam Pnyelesaian Konflik di Laut Natuna Utara. *Jurnal PIR Vol.4, No.2*, 138-141.
- Rio Yusri Maulana, M. A. (2020). Pendekatan Good Governance Dalam Memperkuat Keamanan Perbatasan Negara: Studi Di Wilayah Laut Natuna Utara. *Jurnal Wacana Politik, Vol. 5, No. 1*, 72.
- Rosana, F. C. (2020). *6 Fakta Kapal Coast Guard Cina Yang Masuk Ke Natuna Lagi*. Jakarta: TEMPO.CO.
- Rusydati, A. A. (2014). Hubungan Indonesia-China pasca Normalisasi tahun 1990. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 3, No. 1*, 89.
- Rusydati, A. A. (2014). Hubungan Indonesia-China pasca Normalisasi tahun 1990. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 3, No. 1*, 86.
- Samiah Zulvianto, M. B. (2021). Anatomi Kerjasama Bilateral Indonesia-China Dalam Pengembangan Vaksin Covid-19. *Jurnal Center for Politics and Governance Studies (CPGS) Universitas Bakrie, Vol. 1, No. 1*, 176.
- Siliwanti, R. (2015). *BAB II Prinsip, Visi, Misi dan Strategi Pembangunan di Bidang Politik Luar Negeri*. Retrieved April 26, 2022, from Ditpolkom Bappenas: [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/3\)%20Kajian%20Tahun%202014/Background%20Study/Background%20Study%20Bidang%20Politik%20LuarNegeri.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/3)%20Kajian%20Tahun%202014/Background%20Study/Background%20Study%20Bidang%20Politik%20LuarNegeri.pdf)
- Sinaga, L. C. (2013). Hubungan Indonesia-China Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara. In L. C. Sinaga, *Hubungan Indonesia-China Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara: Perspektif Indonesia* (p. 3). Jakarta: LIPI Press.
- Sinaga, L. C. (2013). Hubungan Indonesia-China Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara. In L. C. Sinaga, *Hubungan*

Indonesia-China Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara: Perspektif Indonesia (p. 5). Jakarta: LIPI Press.

- Sindy Yuliana Putri, D. M. (2019). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 2-10.
- Sitanggang, P. J. (2022). Hubungan Bilateral Indonesia Dengan China Di Bidang Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 39.
- Sitanggang, P. J. (2022). Hubungan Bilateral Indonesia Dengan China Di Bidang Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 3.
- Sorangan, T. (2021, Januari 13). *CNBC Indonesia*. Retrieved from Deal! Ini Hasil Pertemuan Menlu Retno & Menlu China: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210113192618-4-215763/deal-ini-hasil-pertemuan-menlu-retno-menlu-china>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 9). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data. In Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 104). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data. In Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 124). Bandung: Alfabeta.
- Sulistya Ekawati, S. A. (2020). *Sosial, Ekonomi, Kebijakan, & Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Sungkar, S. (2022). Diplomasi Indonesia di Laut China Selatan. *Jurnal Dekonstruksi, Vol. 7, No. 1*, 132.
- Sungkar, S. (2022). Diplomasi Indonesia di Laut China Selatan. *Jurnal Dekonstruksi, Vol. 7, No. 1*, 131-132.
- Supriatna, C. (2016). Keputusan Indonesia Memilih China (Tiongkok) Sebagai Mitra Kerjasama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Muhammdiyah Yogyakarta*, 8.
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23, No.10*, 1-2.
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat Vol.23, No.10*, 2-3.

- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 10*, 3-4.
- Trijono, D. L. (2018). Konflik dan Rekonsiliasi. In D. L. Trijono, *BAB 7 Pencegahan dan Resolusi Konflik* (pp. 83-84). Yogyakarta: Suluh Media.
- Tysara, L. (2022). *Pengertian Brainstorming adalah Cara Menemukan Ide, Pahami Tujuan dan Cara Melakukannya*. Jakarta: Liputan 6.
- Umar Sidiq, M. M. (2019). BAB II Analisa Data Induktif Dan Deduktif, Metode Pengumpulan Data Serta Analisis Data Menurut Mile Dan Huberman. In M. M. Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (p. 58). Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Umar Sidiq, M. M. (2019). BAB III Uji Keabsahan Data, Content Analysis Dan Penggunaan Sampling Dalam Penelitian Kualitatif. In M. M. Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (p. 94). Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Umar Sidiq, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. In M. M. Umar Sidiq, *BAB III Uji Keabsahan Data, Content Analysis Dan Penggunaan Sampling Dalam Penelitian Kualitatif* (pp. 88-97). Jawa Timur: CV. Nata Karya.
- Umar Sidiq, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. In M. M. Umar Sidiq, *BAB III Uji Keabsahan Data, Content Analysis Dan Penggunaan Sampling Dalam Penelitian Kualitatif* (p. 97). Jawa Timur: CV. Nata Karya.
- VOA Indonesia. (2020). *Pengaruh China Besar di Asia Termasuk Indonesia*. Jakarta: VOA Indonesia.
- Wahono, S. (2008). Implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2005 sampai 2008. *Tesis Universitas Indonesia*, 13.
- Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok. *Jurnal Sosioreligius Universitas Pertahanan, No. IV, Vol. 2*, 30.
- Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok. *Jurnal Sosioreligius Universitas Pertahanan, No. IV, Vol. 2*, 26.

- Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok. *Jurnal Sosioreligius No. 4 Vol. 2*, 33.
- Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fsihing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok. *Jurna Sosioreligius Universitas Pertahanan, No. IV, Vol. 2*, 22.
- Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fsihing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok. *Jurnal Sosioreligius Universitas Pertahanan, No. IV, Vol. 2*, 24.
- Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fsihing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok. *Jurnal Sosioreligius Universitas Pertahanan, No. IV, Vol. 2*, 23.
- Wangke, H. (2020). Enforcing Indonesia's Sovereign Right in the North Natuna Sea. *A Brief Study of Actual and Strategic Issues Vol. X, II No. 1/I Puslit/January/2020*, 7.
- Winarjo, W. (2021). Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial. In W. Winarjo, *BAB II Struktur Konflik* (pp. 23-29). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Winarto, K. R. (2018). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China di Perairan Natuna. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 16 No. 2*, 112.
- Wulandari, D. A., & Inayah, A. (2021). The Impact of China's Belt Road Initiative on Indonesia's Export to China. *Journal of World Trade Studies, Vol. 6, No. 1*, 1-12.
- Yosephine, L. (2020). *Natuna: Nelayan di Kepulauan Riau merasa lebih aman sejak kapal perang Indonesia ditambah*. Jakarta: BBC News Indonesia .
- Yusa Djuyandi, A. Q. (2021). Konflik Laut China Selatan Serta Dampaknya Atas Hubungan Sipil Militer di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Muqodimah Vol.5, No.1*.